

ALG
ORI
TMA
CSR

*Terima
Kasih*

KEPADA
PT PERTAMINA PATRA NIAGA
REGIONAL SUMBAGSEL -
DPPU SULTAN MAHMUD
BADARUDDIN II PALEMBANG



PERTAMINA
PATRA NIAGA

YANG MENJADI PENDUKUNG



LA TOFI
SCHOOL OF
SOCIAL
RESPONSIBILITY



LA TOFI

ALG
ORI
TMA
CSR

- ALGORITMA PRINSIP
- ALGORITMA TEROBOSAN
- ALGORITMA PERUBAHAN
- ALGORITMA PERUSAHAAN

ALGORITMA CSR

(sebagai framework keberlanjutan)

Rumus bertanggungjawab sosial bagi perusahaan ini, saya persembahkan: untuk penentu dan pelaksana CSR di berbagai sektor bisnis, pemerintah, masyarakat, konsultan CSR dan siapa saja yang percaya bahwa tanggung jawab sosial bukanlah sekedar memulihkan lingkungan hidup dan masyarakatnya tapi juga mewariskan perusahaan yang sehat kepada anak cucu.

La Tofi

Jakarta,
19 Oktober 2023

ALGORITMA PRINSIP

1 BERAWAL DARI BUMI YANG TAK LAGI LAYAK HUNI

Indikasi baru menunjukkan kecenderungan daun seperti terbakar dengan sendirinya. Dari pinggir mengarah ke tengah. Fotosintesis berlangsung tidak normal. Proses penyerapan karbon tidak terjadi. Oksigen yang dilepas pun tersendat. Artinya, Bumi akan terus memanas.

2 KEMANA HARUS PINDAH?

Bila proses fotosintesis yang tidak normal ini merata pada semua benua, manusia akan sulit bernapas. Kemana harus menyelamatkan diri? Pindah ke planet lain? Oh, Elon Musk belum rampung menyiapkan roket untuk ke planet Mars. Itu pun hanya untuk sekedar berwisata bagi orang-orang super kaya. Alih-alih bisa memindahkan miliaran penduduk Bumi. Mars tidak diciptakan menyerupai Bumi. Kecuali ada teknologi instan yang mengkloning sumber daya bumi ke planet Mars.

3 HARUS MENEMUKAN SOLUSI AGAR TIDAK MUSNAH PELAN-PELAN

Mencari penyelesaian dari meningkatnya suhu Bumi hendaknya mengurai sebab akibatnya. Industri atau secara generik kita menyebutnya sebagai perusahaan adalah yang paling pertama untuk bertanggung jawab. Dari sini berlaku tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Meminta pertanggungjawaban perusahaan adalah cara paling bijak untuk menemukan solusinya.

4 SEMUA HARUS BERTANGGUNG JAWAB

Kendati perusahaan adalah yang paling bertanggung jawab akan naiknya suhu Bumi, namun tidak seorang pun luput dari tanggung jawab ini. Semua pihak harus menekan emisi karbon serendah mungkin sesuai ambang batas tengah penyerapan secara alamiah.

5 PEMERINTAH HARUS MEMBUAT REGULASI TANPA KOMPROMI

Regulasi yang dibuat adalah untuk menekan emisi dan melakukan konservasi untuk memastikan penyerapan emisi dari yang tidak bisa dikurangi. Regulasi penanganan sampah juga mendesak untuk segera dibuat hingga peraturan daerah. Tidak boleh lagi sekedar basa-basi. Regulasi memastikan terjadinya penutupan TPA atau Tempat Pembuangan sampah Akhir. Sampah harus berakhir di pengolahan atau mekanisme rumah tangga, perusahaan atau lembaga. Yang boleh ada hanya perusahaan pengolah sampah atau daur ulang yang menghasilkan produk baru. Regulasi untuk perusahaan yang mengolah sampah dibuat dengan semangat menihilkan emisi karbon. Bukan menambah emisi baru.

6 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP EMISI KARBON

Secara khusus perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar dalam menangani emisi karbon. Karena memang aktivitas perusahaan yang paling banyak menghasilkan karbon. Masing-masing perusahaan harus menghitung jejak karbonnya untuk kemudian menentukan cara-cara pengurangannya. Termasuk mengatasi masalah di masyarakat akibat emisi karbon perusahaan.

7 SAMPAH DAN EMISI KARBON

Perusahaan tidak boleh berhenti menghitung emisi karbon hingga produknya terjual. Ketika dipakai dan menjadi sampah pun harus dihitung emisinya. Dari sinilah pertimbangan ramah lingkungan harus dilakukan dan dipastikan masuk dalam regulasi pemerintah. Bila tidak ramah lingkungan dalam aturan yang sangat ketat, maka perusahaan hanya memiliki satu pilihan menyetop untuk tidak merilis produknya.

8 MEKANISME PENYERAPAN KARBON DAN PENGOLAHAN SAMPAH

Perusahaan berkewajiban mengembangkan mekanisme alamiah dalam penyerapan karbon hingga ke titik nol, baik secara sendiri maupun melalui Bursa Karbon.

Demikian pula cerita akhir dari sepotong sampah produk atau kemasan tidak akan bisa terjejak dan terdampar di pantai maupun terombang-ambing di sungai dan lautan atau pun dasar samudera.

Cukup sudah cerita sampah ini berakhir dalam satu periode kepemimpinan presiden.

Roadmap regulasi dan aksinya tidak dibuat melebihi 5 tahun sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan.

ALGORITMA TEROBOSAN

1 CSR ITU DIMULAI DARI PENGAMBIL KEPUTUSAN

Bertanggung jawab terhadap emisi karbon maupun akibat operasional lain perusahaan terhadap masyarakat merupakan tanggung jawab CEO ataupun direktur utama. CEO harus memimpin langsung komite CSR yang dibentuk untuk memastikan internalisasi tanggung jawab sosial perusahaan ke seluruh divisi. Prinsip-prinsip pengelolaan yang baik berdasarkan keberlanjutan harus ditanamkan langsung oleh CEO kepada semua karyawan. Visi misi perusahaan yang didasarkan keberlanjutan perlu ditetapkan untuk mendapat dukungan dari pemangku kepentingan.

2 MENGHITUNG JEJAK KARBON

Tidak ada program CSR tanpa lebih dahulu menghitung jejak karbon. Sejumlah emisi yang dihitung dari siklus operasional perusahaan ini akan mengarahkan cara pengurangannya, atau kompensasinya pada masyarakat terdampak. Dari jejak karbon satu perusahaan akan menyumbang pada totalitas emisi yang merusak Bumi. Begitu juga upaya-upaya penihilannya akan menyumbang pada NDC atau Nationally Determined Contribution. Kontribusi yang ditetapkan secara nasional ini akan mudah dilaporkan oleh pemerintah kepada UNFCCC atau United Nations Framework Convention

on Climate Change. Dari menghitung jejak karbon dan upaya penihilannya bukanlah beban tetapi kewajiban bisnis yang seharusnya dilakukan, bila ingin tetap berbisnis dalam lingkungan hidup yang lestari. Pada kenyataan perubahan iklim saat ini, inovasi untuk Net Zero Emission dan inisiatif melestarikan lingkungan hidup melampaui kewajiban adalah sesuatu yang dituntut oleh Bumi kita tercinta. Makin green dan makin baik citra perusahaan di mata publik, maka perusahaan akan menuai keberkahan dari lingkungan hidup maupun masyarakat. UMKM hingga perusahaan besar berkewajiban menghitung jejak karbonnya.

3 MENGAITKAN DENGAN PRODUKTIVITAS

Salah satu penghalang, kenapa perusahaan ragu untuk menjalankan CSR adalah pertanyaan mereka: apa gunanya bagi kami? Sangat berguna. CSR bisa meningkatkan produktivitas. Caranya, seluruh divisi diminta untuk bergabung dalam komite CSR yang dipimpin oleh CEO, kemudian masing-masing membuat rencana pengembangan produktivitas divisinya dengan memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Keseluruhan dari rencana pengembangan itu dikaitkan dengan marketing, sehingga hasil akhirnya merupakan keuntungan bagi perusahaan. CSR bukanlah suatu yang terpisah dari bisnis perusahaan. Keberlangsungan perusahaan akan ditentukan dari tanggung jawab sosial.

4 BANGUN KEMITRAAN MELALUI FORUM CSR DAERAH

Regulasi CSR atau yang terkait dengan CSR adalah cerita misteri. Ada peraturannya tetapi menjadi tanda Tanya pada pelaksanaannya. Situasi saat ini tentu tidak menguntungkan bagi semua pihak. Saya menemukan satu solusi untuk memecah kebekuan dengan mendorong CSR di daerah, di tempat perusahaan beroperasi. Dari pengalaman selama ini, dalam forum CSR daerah terjadi komunikasi 3 pihak: perusahaan, masyarakat dan pemerintah. Melalui forum semua menjadi terang. Kolaborasi kemudian bisa dijalin masing-masing membuat rencana pengembangan produktivitas divisinya dengan memperhatikan pembangunan.

5 BANGUN STANDARD

Kebingungan pelaku bisnis untuk menjalankan tanggung jawab sosial adalah tidak adanya standard pada sektor mereka. Yang ada hanyalah prinsip-prinsip umum. Sangat penting – misalnya bagi perusahaan perbankan – melalui asosiasi perbankan secara bersama membangun standard CSR perbankan. Begitu juga pada sektor pertambangan. Namun saran saya, jangan buat forum CSR berdasarkan sektor, karena akan menciptakan eksklusifitas yang tidak perlu. Namun bila bergabung di dalam forum CSR daerah – bukan hanya dengan stakeholder – tetapi akan bertemu dan menjalin kemitraan dengan perusahaan sektor berbeda.

6 MENGHITUNG NILAI DAMPAK PROGRAM BERKELANJUTAN

Semua yang dilakukan dalam rangka tanggung jawab sosial harus dihitung nilai dampaknya, baik terhadap komunitas maupun terhadap perusahaan. Menghitung nilai dampak, menggunakan rumus sederhana dengan menjumlahkan semua nilai pengaruh dari program dikurangi nilai biaya. Kalau ternyata banyak selisihnya, berarti program memberikan nilai dampak yang cukup bagus.

7 KOMUNIKASIKAN CAPAIAN KEBERLANJUTAN

Seringkali kita sungkan untuk menyampaikan keberhasilan ke internal perusahaan maupun ke publik. Buang jauh-jauh kesungkaman itu karena akan menghambat pengembangan lanjut dari program keberlanjutan perusahaan. Komunikasi akan memberikan resonansi positif untuk terus memompa energi keberlanjutan. Banyak pihak akan menjadikannya sebagai inspirasi. Mereka pasti mengenang kebaikan kita sebagai sumber kebaikan mereka selanjutnya. Mengkomunikasikan nilai dampak program keberlanjutan akan sangat disenangi oleh yang menerimanya. Hal itu akan menjadi wisata hati dari kepenatan kita setiap hari dalam menerima informasi media yang bertendensi: kabar buruk adalah berita bagus. Agar menjadi kabar baik sebagai berita bagus, maka kreatiflah merancang komunikasinya.

ALGORITMA PERUBAHAN

1 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KELAPA SAWIT ATAS KEBAKARAN LAHAN

Pembakaran lahan dan hutan bisa dihentikan apabila seluruh perusahaan kelapa sawit dan HTI mau sedikit capek untuk menjaga lahannya masing-masing, agar terhindar dari kebakaran. Bila akhirnya terbakar juga setelah memberikan laporan kesanggupan menjaga lahan, maka sanksi hukum yang tegas menjadi konsekuensinya. Dalam konteks CSR, pembakaran lahan untuk membuka area perkebunan adalah perampokan terhadap lingkungan dan hak kenyamanan publik. Perusahaan seperti ini hanya menggambarkan jejak kerakusan pemilikinya. Celakanya, kepada pemerintah daerah mereka melaporkan telah melakukan CSR dengan memberikan sumbangan sembako kepada warga sekitar. Padahal sumbangan hanyalah untuk menutupi kejahatannya.

2 KEMBALI KE PENGERTIAN CSR

Apapun yang dilakukan oleh perusahaan dengan nama CSR, bukanlah CSR atau tidak berarti apa-apa apabila tanggung jawab utama terhadap lingkungan diabaikan. CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan harus merujuk kepada pengertian tanggung jawab sosial berdasarkan ISO 26000. Panduan tanggung jawab sosial menurut ISO 26000, sangat jelas, sebagai manajemen atas resiko yang ditimbulkan dan keputusan-keputusan organisasi.

3 DUDUK BERSAMA DALAM FORUM CSR DAERAH

Di sini jelas, pembakaran lahan merupakan tata kelola yang buruk dalam menjalankan perusahaan. Seringkali pemilik perusahaan berbohong, bukan kamilah yang membakar. Api berasal dari luar kawasan. Mungkin dari lahan perkebunan perorangan. Kami hanya mendapatkan akibat dari angin yang berhembus kencang. Perusahaan-perusahaan kelapa sawit dan HTI perlu didudukkan dalam satu forum CSR di daerah agar bersama-sama menjaga Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan, dan Sulawesi.

4 JANGAN BENCI TAMBANG

Seorang kawan, Simon F. Sembiring, mantan Direktur Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, suatu hari bercerita, kota New York dan Kuala Lumpur dulunya adalah wilayah pertambangan. Ia ingin mengatakan, tidak ada alasan untuk membenci keberadaan pertambangan. Dengan menunjuk telepon genggamnya, sebagian besar bahan yang membentuknya berasal dari produk tambang. Kepada para pembenci tambang, Simon menyindir, kenapa ikut menikmati kemudahan yang ditawarkan oleh adanya telepon genggam.

5 KENAPA BANGKA BELITUNG TIDAK DIJADIKAN NEW YORK?

Saya teringat Bangka Belitung. Suatu daerah yang dijarah timahnya kemudian ditinggalkan begitu saja. PT Timah Tbk yang mewarisi praktek dan konsesi tambang sejak jaman Belanda, berusaha keras untuk mereklamasi lahan bekas tambangnya hingga kini harus mengurut dada. Tanaman yang tumbuh lenyap kembali oleh karena penambangan ilegal yang masih mencari remah-remah timah. Bangka Belitung sepertinya belum berhenti menangis.

6 HABIS TIMAH DI DARAT KENAPA PASIR LAUT JUGA DIHABISI?

Menipisnya cadangan timah di darat, tidak menyurutkan nafsu para pebisnis. Mereka menyedot pasir laut yang mengitari Kepulauan Bangka Belitung untuk diambil timahnya. Betapa ekosistem laut akan hancur berantakan. Tidak ada yang menghitung kerugiannya. Pasti sangat mengerikan akibatnya bagi kehidupan manusia. Tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan telah terbilang 200 tahun, Kepulauan Bangka Belitung dan Pulau Singkep menjadi wilayah tambang timah, tidak ada “New York” atau “Kuala Lumpur” yang tercipta di atasnya.

7 MUTIARA DI TENGAH LUMPUR

Kisah keberanian seorang Kepala Desa Lenggang Kecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur yang tidak disebutkan namanya oleh situs Ditjen BPDASPS Kementerian Kehutanan, sungguh mempesonakan saya. Ia mempersilahkan warganya untuk mereklamasi seluruh lahan bekas tambang di luar kawasan hutan dengan tanaman sengon. Bibit tanaman diperoleh dari perusahaan pemilik KP atau Kuasa Pertambangan dan perusahaan penggergajian kayu. Hasil dari tanaman sengon ini tentu saja dinikmati oleh warga yang menanamnya. Sungguh sebuah kolaborasi manusia dan alamnya.

8 UBAH BEKAS TAMBANG JADI KOTA METROPOLITAN

Tidak ada kata terlambat bagi kawasan tambang seperti Bangka Belitung, Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan Sumbawa, untuk membangun kota-kota baru yang tidak kalah gemerlap seperti New York atau Kuala Lumpur. Atau, menjadi forest city yang bertumpu pada wisata konservasi alam. Perusahaan-perusahaan yang kini melakukan penambangan tidak hanya diberi tanggung jawab untuk mereklamasi lahan bekas tambang, tetapi juga mengembangkan segala aspek kebutuhannya sejalan dengan pendirian sebuah kota. Misalnya, terdapat pusat pendidikan yang bertumpu pada kebutuhan tambang atau perekonomian pasca tambang. Demikian pula perdagangan barang dan jasa dari kebutuhan warga tambang yang melibatkan kebutuhan masyarakat kabupaten. Termasuk pelayanan kesehatan diperluas.

9 MENJADI KAWASAN INDUSTRI

PT Timah yang beroperasi di Bangka Belitung misalnya, bisa membangun kawasan industri manufaktur atau kawasan industri pariwisata sebagai diversifikasi usaha. Di kawasan industri manufaktur, PT Timah memberikan kemudahan kepada banyak industri lainnya untuk mengembangkan Bangka Belitung. Sedangkan, aset tanah bekas lahan tambang yang berdekatan dengan pantai di Bangka Belitung yang indah, bisa mengundang investor perhotelan maupun pengembang taman rekreasi.

10

CSR YANG SEMPURNA

Stakeholder masyarakat tentu saja dilibatkan dan menjadi pertimbangan penting untuk setiap proses pengembangan. Dalam mengembangkan kawasan industri manufaktur atau pariwisata, PT Timah bisa bekerjasama dengan perusahaan yang khusus mengembangkan kawasan industri. Tidak perlu mengerjakan sendiri semuanya. Bila akhir dari pengembangan kota mewujudkan kesejahteraan dan kemanfaatan bagi Bangka Belitung dan PT Timah, maka sesungguhnya telah berlangsung CSR yang sempurna.

11 **STAKEHOLDER TIDAK SATU KABUPATEN SAJA**

Bagaimana dengan PT Newmont Nusa Tenggara yang kini beralih ke PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang beroperasi di Pulau Sumbawa? Saya kira jawabannya kurang lebih sama dengan PT Timah di Bangka Belitung. Namun, lokasi penambangan PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang cenderung berada di Kabupaten Sumbawa Barat, tidak bisa hanya memfokuskan pembangunan di satu wilayah kabupaten saja.

12 JANGAN BERHENTI PADA HABISNYA CADANGAN EMAS

Beberapa kabupaten lain bisa dikembangkan masing-masing, sesuai potensi dan keragaman yang menciptakan kesatuan daya dukung. Industri wisata misalnya, bisa bersama PT Sumbawa Timur Mining yang hadir kemudian untuk mengembangkan kawasan pantai Hu'u di Kabupaten Dompu yang sudah terkenal sebagai tempat berselancar. Pantai-pantai yang berdekatan dengan lokasi penambangan juga bisa dikembangkan sebagai tempat wisata, kawasan industri, dan pelabuhan. Begitu juga bagi Kota Bima dan Sumbawa yang berpotensi dikembangkan sebagai kota perdagangan barang maupun jasa. Dengan cara ini, kehadiran PT Amman Mineral Nusa Tenggara dan PT Sumbawa Timur Mining akan memupus angka kemiskinan di Pulau Sumbawa, sekaligus menciptakan pusat perkembangan baru.

13 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN KEHUTANAN

Lupakan sejarah kelam dari perusahaan HPH yang telah menggundulkan banyak hutan dan tidak mampu melaksanakan penanaman kembali. Bila masih ada perusahaan HPH yang beroperasi, maka penanaman kembali dan konservasi hutan menjadi suatu keharusan. Pola tebang pilih yang memungkinkan terjadi pengelolaan hutan berkelanjutan, mesti dilaporkan secara periodik perkembangannya. Kehadiran HPH tidak boleh mengurangi daerah tutupan hijau sedikitpun. Terhadap hutan yang terlanjur gundul karena penebangan yang tidak bertanggung jawab di masa sebelumnya, kewajiban pemilik HPH untuk merehabilitasinya sebagai hutan produksi. Sehingga kita bisa mengerem laju deforestasi. Pelibatan komunitas di sekitar HPH di dalam bisnis perhutanan juga perlu dilakukan. Bertanggung jawab terhadap mereka merupakan CSR HPH.

14 **SAMPAI KAPAN KITA MENCEMARI UDARA DENGAN EMISI KARBON?**

Kalau beberapa dekade lalu kita terpesona dengan himbauan “back to nature” sebagai lawan dari kehidupan “modern” yang tidak alamiah, nampaknya “back to kampung” akan menjadi pilihan baru untuk hidup menetap di kampung. Kenapa kampung? Jauh dari polusi udara yang mengganggu kesehatan. Pencemaran udara di kota-kota besar sudah teramat parah. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab? Tentu kita bisa menyebut sumber penyebabnya, pertama yang memproduksi dan mendistribusikan bahan bakar. Yang kedua, yang memproduksi dan mendistribusikan mesin

serta kendaraan bermotor. Yang ketiga, adalah konsumen yang memutuskan mesin atau kendaraan bermotor itu harus berjalan. Ketiganya membentuk mata rantai yang saling mempengaruhi. Mengurangi emisi karbon tentu saja bergantung pada niat baik dari ketiga pemangku kepentingan, ditambah pemerintah sebagai pembuat regulasi. Tantangan besarnya, terletak pada perusahaan migas dan perusahaan kendaraan bermotor, serta pemilik-pemilik pabrik yang mengoperasikan mesin-mesin produksi. Mereka sangat bernafsu untuk meraih laba yang besar dari peningkatan penjualan. Dan mereka tidak mau peduli terhadap emisi karbon yang ditimbulkan oleh konsumen.

15

**TANGGUNG JAWAB
SOSIAL PERUSAHAAN
MIGAS DAN OTOMOTIF**

Mengelola resiko lingkungan akibat emisi karbon adalah kewajiban utama perusahaan migas maupun otomotif. Namun bagi perusahaan migas seperti Pertamina misalnya, transformasi ke arah perusahaan energi baru dan terbarukan (EBT) tidak lagi menjadi basa-basi. Mendorong masyarakat untuk menggunakan listrik tenaga surya dengan menjual panel surya adalah langkah nyata berbisnis EBT. SPBU atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum bisa

berangsur digantikan dengan Bahan Bakar Gas (BBG) atau sebagai stasiun pengecasan mobil listrik. Pertamina dalam hal ini perlu memiliki kemauan dan strategi bisnis untuk terjun sebagai pioneer. Mengajak industri otomotif untuk meninggalkan penggunaan bahan bakar fosil juga merupakan bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan migas. Tidak mudah bagi kita semua untuk segera meninggalkan kebutuhan terhadap bahan bakar fosil, namun upaya menggantikannya perlu dimulai oleh seluruh pemangku kepentingan.

16 PERLU REGULASI YANG MEMADAI

Pemerintah harus memulai dengan membuat kebijakan yang mengikat semua pihak berada dalam sistem penyelamatan lingkungan. Bukan dengan terus mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi mengorbankan kelestarian lingkungan. Dengan ditemukannya baterai yang tahan lama, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak mengeluarkan kebijakan penggunaan yang signifikan terhadap mobil listrik. Kompensasi perusahaan migas dan otomotif terhadap penyerapan CO2 dengan menanam sebanyak mungkin pohon, tidak bisa dijadikan alasan bahwa CSR telah dipenuhi. Mendukung riset EBT yang diarahkan untuk memberikan manfaat bisnis juga perlu dianggarkan. Begitu juga bagi Pertamina misalnya, perlu melakukan kampanye penggunaan EBT kepada publik, merupakan CSR yang baik.

17 **KENAPA PEMERINTAH TIDAK KONSERVASI AIR DAN MEMBERIKAN AIR MINUM MURAH BAGI RAKYAT**

Dibatalkannya Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi telah membukakan pemahaman baru bahwa air – sesuai Undang-Undang Dasar 1945 – tidak boleh diprivatisasi tetapi menjadi hak setiap orang untuk mendapatkannya. Oleh karenanya pemerintah memainkan peranan penting bagi ketersediannya. Bencana kekeringan dan langka-nya air bersih, serta banjir yang sering menimpa Indonesia sekarang ini, membuktikan pemerintah tidak melakukan konservasi air. Contohnya, daerah tangkapan air yang berada di hulu dibiarkan untuk berubah fungsi. Begitu juga daerah aliran sungai yang tidak dijaga kebersihan dan keanekaragaman hayatinya.

18 AKHIRNYA PERUSAHAAN AMDK YANG MERAJAI

Karena konservasi air tidak dilakukan dengan baik, PDAM kesulitan mendapatkan air baku, akibatnya warga menjadi sukar mendapatkan air bersih. Kelangkaan air bersih, terutama untuk diminum, mendorong perusahaan Air Minum Dalam Kemasan berlomba mempromosikan diri sebagai produk paling bermanfaat bagi tubuh. Kebanyakan di antara mereka menyatakan sumber airnya berasal dari pegunungan. Mengandung mineral yang baik. Harganya

pun menjadi sangat mahal bagi yang berpenghasilan rendah. Dengan biaya promosi yang teramat besar, perusahaan-perusahaan AMDK mampu menguasai kebutuhan hari-hari dari setiap orang Indonesia dalam mendapatkan air minum. Bukan salah mereka apabila kita sangat tergantung dengan AMDK. Pemerintah yang gagal memenuhi kebutuhan air bersih bagi warganya adalah pemicu ketergantungan terhadap swasta. Padahal air sebagai kebutuhan dasar yang menjadi hak asasi setiap warga negara Indonesia ini harus dicukupi dari pelayanan pemerintah.

19 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PENYEDIA AIR BERSIH

Pasca pembatalan Undang-Undang SDA sekarang ini, ada ruang kosong yang menimbulkan kebingungan. Perusahaan AMDK menunggu dengan harap-harap cemas, apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap mereka. Pemerintah daerah nampaknya bingung harus berbuat apa, padahal “bola” sudah di tangan mereka. Tinggal dimainkan saja, dengan membuat berbagai peraturan daerah. Pemerintah daerah bisa membuat Perda pemenuhan air bersih untuk warga dengan 2 cara pendistribusian. Pertama,

melalui pipa-pipa dari PDAM langsung kepada rumah-rumah. Kedua, air siap minum dengan kemasan galon dan botol-botol plastik. Dalam hal ini PDAM adalah juga perusahaan. Ia boleh mengambil untung sedikit untuk memastikan keberlangsungan pelayanannya. Pemerintah daerah tidak boleh menjadikan PDAM sebagai pintu pendapatannya. Dengan cara ini PDAM akan mendapatkan pelayanan yang baik dengan harga yang sangat murah. Pertanyaan lainnya, bagaimana dengan perusahaan AMDK yang sudah merajalela sekarang ini, setelah PDAM menjalankan fungsi negara untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga?

20

**BANK BERTANGGUNG
JAWAB**

Bila penyebab kerusakan lingkungan selalu kita alamatkan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab, adakah pihak sebelumnya yang turut menentukan? Saya mengatakannya, ada, yaitu bank sebagai perusahaan penyedia jasa keuangan terhadap perusahaan-perusahaan itu.

21 KENAPA TIDAK MEMUTUS KERUSAKAN LINGKUNGAN DARI MATA RANTAI JASA KEUANGAN

Kenapa bank ikut menjadi faktor perusak? Tentu saja terkait, apabila mereka tidak mengenali resiko lingkungan akibat operasional perusahaan yang menjadi nasabahnya. Perbankan bisa memutuskan untuk tidak memberi kredit kepada perusahaan perusak lingkungan atau yang tidak memiliki reputasi baik, yang ditunjukkan dengan nilai rendah dalam laporan keberlanjutan

atau peringkat ESG-nya. Sebaliknya, bank bisa memutuskan untuk memberikan kredit kepada yang melakukan inisiatif keberlanjutan dengan sangat baik. Masalahnya, dari ribuan perusahaan besar di Indonesia, hanya sedikit yang membuat laporan keberlanjutan atau ESG. Sehingga, bank akan sulit memastikan reputasi lingkungannya. Tentu saja peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan sangat penting dalam menerapkan sistem penyaringan melalui adanya laporan keberlanjutan atau CSR.

ALGORITMA PERUSAHAAN

1 BUKAN AYAM DAN TELUR

Perdebatan ayam dan telur tidak berlaku. Yang mana yang lebih dahulu antara ayam dan telur untuk menunjukkan pendiri atau perusahaan. Yang pasti, perusahaan didirikan oleh para pendirinya untuk tujuan tertentu.

2 ORANG BAIK ATAU BUKAN?

Kalau dulu, nama perusahaan atau merek produk cenderung memasukkan unsur nama pemilik atau pendiri agar konsumen bisa meyakini dari mana asal usulnya. Sudah pasti para penjahat tidak masuk dalam kecenderungan ini. Sangat mudah mengetahui, siapa pembakar lahan, yaitu dari mengetahui siapa pemilik lahan. Tidak mungkin orang baik, menyuruh atau membiarkan lahannya terbakar. Kalau pun kebakaran terjadi di luar upaya dan tanggung jawabnya, maka pengadilan bisa membebaskannya.

3 DNA PEMILIK

Sepak terjang perusahaan didorong oleh visi yang dibangun oleh pemiliknya. BUMN, sangat bergantung kepada rezim. Tetapi kata negara di belakang singkatan, sebenarnya tidak harus bergantung kepada siapa yang memerintah. Undang-undang yang menjadi pijakan, sudah cukup memberikan arah, bahwa BUMN mengemban misi negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Bila perusahaan mewarisi DNA pemilik, maka DNA siapa pada BUMN? Jawaban kita mungkin terbelah antara negara dan rakyat. Saya cenderung mengatakannya sebagai negara.

4 CSR SEBAGAI DNA

DNA atau penanda genetika pada manusia bisa dikenali juga pada perusahaan melalui CSR. Kenapa? Karena CSR merupakan sepakterjang yang selalu mendasarkan pada kepentingan lingkungan-sosial-ekonomi. CSR atau DNA yang baik ditunjukkan dengan berimbanginya pencapaian lingkungan, sosial, dan ekonomi. Bila ada yang kalah dari ketiga faktor ini, dipastikan mewarisi DNA yang buruk dari pemiliknya.

5 MENGETES DNA PERUSAHAAN

Sangat mudah. Pertama, dari usia perusahaan. Apakah sudah melewati periode kembali modal. Kedua, memiliki visi dan misi menyelamatkan lingkungan. Ketiga, memiliki “sertifikat berkelakuan baik” yang merujuk kepada best practice yang terus dikembangkan.



LA TOFI

**FRAMEWORK
ALGORITMA CSR**

INI BERDASARKAN KONDISI
FAKTUAL LINGKUNGAN HIDUP
- MASYARAKAT - PERUSAHAAN
SAAT INI, DAN 2 BUKU
**REFERENSI: KILL CSR DAN
JANGAN RAMPOK ALAM**

